



BUPATI MAROS

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dan apresiasi terhadap Pegawai Negeri Sipil teladan dan berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, maka perlu memberikan penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Maros sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
6. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
7. PNS Teladan adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas kompetensi, disiplin dan perilaku moral yang baik berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
8. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau instansi yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi atau Teladan.
9. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Maros.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
 - b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. meningkatkan kinerja dan produktivitas PNS;
 - d. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
 - e. menumbuhkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
 - f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

**BAB III
SASARAN**

Pasal 3

Sasaran pemberian penghargaan bagi PNS adalah sebagai berikut:

BAB IV
KRITERIA, KATEGORI DAN NOMINASI
Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 4

- (1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. PNS dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah secara terus menerus tanpa putus;
 - e. diutamakan untuk PNS yang belum pernah ditetapkan sebagai PNS Teladan; dan
 - f. untuk PNS yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai PNS Teladan dapat dipilih kembali setelah 5 (lima) tahun.
- (2) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
 - b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; atau
 - c. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada Pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.

Pasal 5

Kriteria khusus pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan dan PNS Berprestasi adalah berdasarkan penilaian.

Bagian Kedua
Kategori PNS Teladan

Pasal 6

- Kategori penilaian PNS Teladan dibagi menjadi 4 (empat) kategori yang terdiri dari:
- a. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III;
 - b. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV;
 - c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum; dan
 - d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagian Ketiga
Jumlah Nominasi

Pasal 7

- (1) Jumlah nominasi untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- b. PNS Teladan Jabatan Pengawas atau Eselon IV dan jabatan fungsional tertentu tingkat muda sebanyak 5 (satu) orang;
 - c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana atau Fungsional Umum sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan peringkat nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah nilai.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 8

Persyaratan pemilihan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. usulan dari Perangkat Daerah;
- b. formulir penilaian yang telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala SKPD;
- c. sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- d. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- e. surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- g. foto copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- h. foto copy Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satya Lancana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- i. foto copy Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat Teknis yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- j. foto copy Ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir; dan
- k. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 9

Persyaratan penetapan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. usulan dari Perangkat Daerah;
- b. formulir penilaian yang telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala SKPD;
- c. sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- d. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- e. surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- g. foto copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- h. foto copy Piagam prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- i. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB VI TIM PENILAI

Pasal 10

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Koordinator;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Sekretaris; dan
 - g. Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim.
- (3) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi PNS Teladan, PNS Berprestasi, dan melaporkan kepada Bupati;
- b. menerima dan meneliti berkas persyaratan usulan PNS Teladan, PNS Berprestasi yang telah diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. mengisi daftar isian penilaian;
- d. melaksanakan penilaian rekam jejak PNS;
- e. menetapkan dan mengumumkan calon PNS Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai PNS Teladan oleh Bupati.

BAB VII MEKANISME PENILAIAN

Pasal 13

Penilaian PNS Teladan dan PNS Berprestasi dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, daftar isian dan penilaian rekam jejak PNS.

Pasal 14

- (1) PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan yaitu PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.
- (2) PNS yang ditetapkan menjadi PNS Berprestasi yaitu PNS yang memiliki prestasi dan keahlian yang mendasarkan pengakuan secara tertulis, serta memenuhi

Pasal 15

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :

- a. penilaian utama, terdiri dari:
 1. prestasi kerja;
 2. kedisiplinan;
 3. masa kerja;
 4. kecakapan;
 5. keterampilan;
 6. hasil kerja yang diperoleh;
 7. moral dan perilaku;
 8. kerjasama; dan
 9. kreativitas dan inovasi.
- b. penilaian pendukung, terdiri dari:
 1. bintang jasa;
 2. satyalancana Karya Satya;
 3. piagam yang bersifat prestasi kerja;
 4. pendidikan;
 5. diklat penjenjangan; dan
 6. kursus dan/atau diklat.
- c. penilaian rekam jejak yang dilaksanakan oleh Tim

Pasal 16

Formulir penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 17

- (1) Indikator penilaian PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi:
 - a. Penilaian utama berupa Prestasi dan Keahlian yang mendapatkan pengakuan secara tertulis.
 - b. Penilaian pendukung terdiri dari:
 1. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 2. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat; dan
 3. Berkinerja baik.
- (2) Formulir penilaian PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

BAB VIII PENETAPAN PENGHARGAAN PNS

Pasal 18

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan dan PNS Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IX
WAKTU DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan dan PNS Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada PNS Teladan dan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pin emas;
 - b. piagam penghargaan; dan
 - c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan pada Peringatan Hari Besar Nasional atau pada pelaksanaan Apel Pagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal *22 Mei 2023*
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal *22 Mei 2023*
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR : 29 TAHUN 2023
 TANGGAL : 22 MEI 2023
 TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN
 PENGHARGAAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MAROS

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

Kategori : Eselon_III/Eselon_IV_ke_bawah/Pelaksana/Fungsional Tertentu
 Nama :
 NIP :
 Pangkat, Gol/Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

No	UNSUR PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
A	PENILAIAN UTAMA		
1.	PENILAIAN PRESTASI KINERJA PNS (SKP)		
	a. 91 - ke atas	95	
	b. 80 - 90	80	
	c. 75 - 79	65	
2.	KEDISIPLINAN		
	a. Kehadiran 100% dalam setahun	95	
	b. Kehadiran 90% dalam setahun	85	
	c. Kehadiran 80% dalam setahun	75	
	d. Kehadiran 70% dalam setahun	65	
3.	MASA KERJA		
	a. 26 tahun ke atas (tidak terputus)	95	
	b. 21-25 tahun ke atas (tidak terputus)	85	
	c. 16-20 tahun ke atas (tidak terputus)	75	
	d. 11-15 tahun ke atas (tidak terputus)	65	
	e. 5-10 tahun ke atas (tidak terputus)	55	
4.	KECAKAPAN		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. cukup	65	
5.	KETERAMPILAN		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. cukup	65	
6.	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. cukup	65	
7.	MORAL DAN PERILAKU		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. cukup	65	
8.	KERJASAMA		

9.	KRETIFITAS DAN INOVASI		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	BINTANG JASA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
	d. Dan Lain-lain	5	
2.	SATYA LENCANA KARYA SATYA		
	a. Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun	15	
	b. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun	10	
	c. Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun	5	
3.	PIAGAM-PIAGAM PRESTASI KERJA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
	d. Dan Lain-lain	5	
4.	PENDIDIKAN		
	a. Strata 3/Spesialis	30	
	b. Starata 2	25	
	c. Starata 1	20	
	d. Diploma	15	
	e. SLTA	10	
5.	DIKLAT PENJENJANGAN		
	a. Ditlatpim Tingkat III atau yang setara	10	
	b. Ditlatpim Tingkat III atau yang setara	5	
6.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL		
	a. 250 jam ke atas	25	
	b. 200 - 250 jam	20	
	c. 100 - 200 jam	15	
	d. 8 - 100 jam	10	
	JUMLAH		

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 29 TAHUN 2023

TANGGAL : 22 MEI 2023

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

No	UNSUR PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENILAIAN UTAMA		
	PIAGAM PENGHARGAAN PRESTASI DAN KEAHLIAN		
	a. ADA	50	
	b. TIDAK ADA	0	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	HUKUMAN DISIPLIN		
	a. PERNAH	0	
	b. TIDAK PERNAH	20	
2.	SANKSI KODE ETIK PNS AKIBAT PERBUATAN TERCELA BAIK DALAM DINAS MAUPUN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT		
	a. PERNAH	0	
	b. TIDAK PERNAH	10	
3.	PENILAIAN PRESTASI KINERJA PNS (SKP)		
	a. 76 - ke atas	20	
	b. 76 - ke bawah	0	
	JUMLAH		
CATATAN : PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DITETAPKAN JIKA MEMENUHI JUMLAH NILAI 100			

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM